

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 035.01.1.427752/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
- 2. Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
- Sebesar : Rp. 424.437.378.000 (EMPAT RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR EMPAT RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
- 04.90 EKONOMI LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	424.437.378.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA II (019) Rp. 424.437.378.000

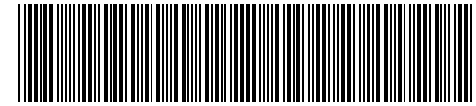
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026

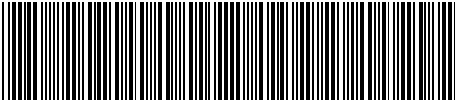


DS:3745-5647-3911-1615

Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp.	196.472.208.000
CL.2491	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital	Rp.	4.500.000.000
CL.2492	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal	Rp.	2.000.000.000
CL.2493	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	Rp.	42.247.000.000
CL.2499	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga	Rp.	2.500.000.000
CL.2500	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	Rp.	2.500.000.000
CL.2503	Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	Rp.	4.000.000.000
CL.2510	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Rp.	4.000.000.000
CL.2513	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Rp.	7.135.000.000
CL.2514	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	Rp.	6.800.000.000
CL.2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Rp.	3.500.000.000
CL.2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Rp.	2.500.000.000
CL.4539	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	Rp.	2.165.000.000
CL.4540	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	Rp.	2.112.000.000
CL.4541	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Rp.	3.097.500.000
CL.4542	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Rp.	3.097.500.000
CL.4543	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Rp.	2.662.500.000
CL.4544	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.	2.500.000.000
CL.4545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	Rp.	3.500.000.000
CL.4546	Koordinasi Kebijakan Percepatan Investasi Dan Hilirisasi	Rp.	3.000.000.000
CL.4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	Rp.	5.000.000.000
CL.5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	Rp.	37.155.708.000
CL.5266	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	Rp.	12.500.000.000
CL.7701	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata	Rp.	3.500.000.000
CL.7702	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka	Rp.	3.500.000.000
CL.7703	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Rp.	4.000.000.000
CL.7704	Peningkatan Layanan Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Rp.	4.000.000.000
CL.7706	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Rp.	2.500.000.000
CL.7707	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara	Rp.	3.000.000.000
CL.7708	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	Rp.	2.500.000.000
CL.7709	Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi	Rp.	3.000.000.000
CL.7710	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Rp.	2.500.000.000
CL.7711	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral	Rp.	4.500.000.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026

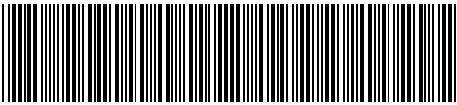


DS:3745-5647-3911-1615

Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

CL.7712	Peningkatan Layanan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Rp.	5.000.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	227.965.170.000
WA.2486	Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Rp.	19.153.092.000
WA.2487	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi	Rp.	4.000.000.000
WA.2488	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Umum	Rp.	185.437.328.000
WA.2489	Pengawasan Inspektorat	Rp.	1.224.750.000
WA.2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian	Rp.	7.500.000.000
WA.4538	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan	Rp.	10.650.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

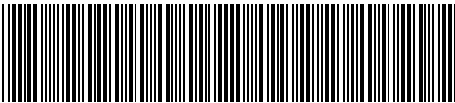


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Program	:	035.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan			196.472.208.000
Kegiatan	:	2491	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital			4.500.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Volume Transaksi E-Commerce (Miliar Faktur Transaksi)			
		2. 01	Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi			
		3. 02	Persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait pelaksanaan DEFA			
		4. 02	Persentase ratifikasi dan pelaksanaan DEFA			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	2491.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	500.000.000
Rincian Output	:	01 ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Terkait Ekosistem Ekonomi Digital	2.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	2491.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.000.000.000
Rincian Output	:	01 PBA.001	Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030 (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000.000
Kegiatan	:	2492	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal			2.000.000.000
	:	1. 01	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED)			
	:	2. 02	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal			
Klasifikasi Rincian Output 3	:	2492.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	6,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.000.000.000
Rincian Output	:	01 ABA.001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal	4.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	:	02 ABA.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Fiskal	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Kegiatan	:	2493	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi			42.247.000.000
	:	1. 01	Penyelesain Efektivitas SKP Tingkat Input Material Sirkular			
	:	2. 02	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

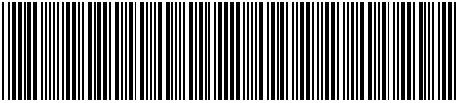


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Klasifikasi Rincian Output	4	:	2493.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	7,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	42.247.000.000	
Rincian Output		:	01	ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektifitas Kebijakan Ekonomi	2.00	Rekomendasi Kebijakan	9.130.000.000
		:	02	ABA.002	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Hubungan Diplomasi Strategis	2.00	Rekomendasi Kebijakan	12.617.000.000
		:	03	ABA.003	Rekomendasi Kebijakan Paket dan Stimulus Ekonomi	3.00	Rekomendasi Kebijakan	20.500.000.000
Kegiatan		:	2499		Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga			2.500.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1.	01	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa			
		:	2.	02	Presentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Pasar Dalam Negeri			
		:	3.	03	Presentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Perlindungan Konsumen			
		:	4.	04	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera			
		:	5.	05	Presentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	2499.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	3,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.500.000.000	
Rincian Output		:	01	ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan Retail dan Pemanfaatan Pasar Dalam Negeri	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
		:	02	ABA.002	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
		:	03	ABA.003	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pasar Dalam Negeri	1.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
Kegiatan		:	2500		Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional			2.500.000.000
		:	1.	01	Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB			
		:	2.	01	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut			
		:	3.	02	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak			
		:	4.	02	Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor			
		:	5.	03	Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA



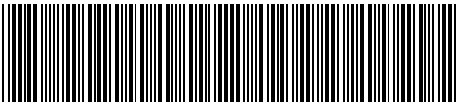
DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	6	:	2500.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	4,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.500.000.000
Rincian Output		:	01	PBA.001 Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional (PN)	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000.000
Kegiatan		:	2503	Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN			4.000.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN			
			2. 02	Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN			
			3. 03	Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN			
			4. 04	Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN			
			5. 05	Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy			
			6. 06	Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN			
			7. 07	Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN			
Klasifikasi Rincian Output	7	:	2503.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.001 Layanan Koordinasi Program, Tata Kelola dan Dukungan Administrasi di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	2.00	Layanan	2.000.000.000
			02	EBA.002 Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	1.00	Layanan	2.000.000.000
Kegiatan		:	2510	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral			4.000.000.000
		:	1. 01	Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia			
			2. 02	Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia			
Klasifikasi Rincian Output	8	:	2510.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	6,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.000.000.000
Rincian Output		:	01	ABA.001 Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilataeral	2.00	Rekomendasi Kebijakan	875.621.000
			02	ABA.002 Rekomendasi Persiapan Forum Bilateral	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.433.164.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

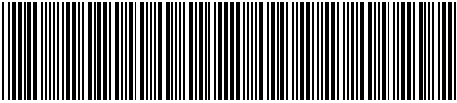


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				Rekomendasi Kebijakan, Kajian				
	03	ABA.003	Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan Bilateral	2.00	Rekomendasi Kebijakan	691.215.000		
Kegiatan	:	2513	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral			7.135.000.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD					
		2. 01	Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Akses Indonesia ke OECD					
		3. 01	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20					
		4. 02	Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD					
		5. 02	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional					
		6. 02	Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)					
		7. 03	Persentase efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)					
		8. 03	Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD					
Klasifikasi Rincian Output	9	:	2513.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	3,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.000.000.000	
Rincian Output	:	01	ABA.001	Rekomendasi Penyusunan Kesepakatan pada Level Teknis untuk Tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan di Forum Ekonomi Multilateral	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	
			02	ABA.002	Rekomendasi Kebijakan Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	2513.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.135.000.000	
Rincian Output	:	01	PBA.001	Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Akses Indonesia ke OECD (PN)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	5.135.000.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA



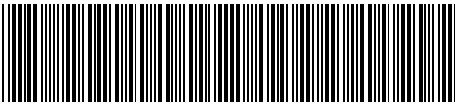
DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Halaman : I A. 5

Kegiatan	:	2514	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional				6.800.000.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional						
		2. 01	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati						
Klasifikasi Rincian Output	11	:	2514.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan			9,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	6.800.000.000
Rincian Output	:	01	ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional			3.00	Rekomendasi Kebijakan	830.877.000
		02	ABA.002	Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan Internasional			2.00	Rekomendasi Kebijakan	642.132.000
		03	ABA.003	Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indonesia dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Internasional			2.00	Rekomendasi Kebijakan	326.991.000
		04	ABA.004	Rekomendasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Ketua/Tuan Rumah dalam Forum Regional			2.00	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000.000
Kegiatan	:	2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil						3.500.000.000
	:	1. 01	Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB						
		2. 01	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Hilirisasi Industri Agro						
		3. 02	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri						
		4. 03	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global						
Klasifikasi Rincian Output	12	:	2519.ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM			4,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.000.000.000
Rincian Output	:	01	ABK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Agro			1.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
		02	ABK.002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Kimia dan Farmasi serta Pengolahan Bahan Galian Non Logam			2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
		03	ABK.003	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Tekstil, Produk Tekstil dan Alas Kaki			1.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

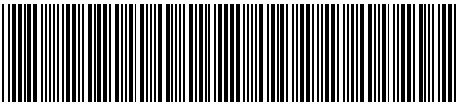


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Klasifikasi Rincian Output	13	:	2519.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.500.000.000
Rincian Output		:	01 PBK.002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
Kegiatan		:	2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor			2.500.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Nilai Ekspor Barang Nasional (USD Milliar)			
			2. 01	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor			
			3. 02	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor			
			4. 03	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan			
Klasifikasi Rincian Output	14	:	2521.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	3,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.500.000.000
Rincian Output		:	01 ABB.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	750.000.000
			02 ABB.002	Rekomendasi Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	750.000.000
			03 ABB.003	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Kegiatan		:	4539	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan			2.165.000.000
		:	1. 01	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Literasi dan Inklusi Keuangan			
			2. 01	Tingkat Literasi Keuangan Konvensional			
			3. 02	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah			
			4. 02	Tingkat Literasi Keuangan Syariah			
Klasifikasi Rincian Output	15	:	4539.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	Unit	15.000.000
Rincian Output		:	01 CCL.001	Layanan Sarana Sistem Informasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)	1.00	Unit	15.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

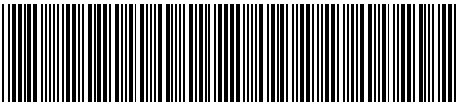


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Klasifikasi Rincian Output	16	:	4539.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.150.000.000
Rincian Output		:	01	PBA.001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.150.000.000
Kegiatan		:	4540	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik			2.112.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik (Triliun Rupiah)			
			2. 01	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda			
			3. 01	Persentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah			
			4. 02	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerjasama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah			
			5. 02	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik			
			6. 03	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah			
Klasifikasi Rincian Output	17	:	4540.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	6,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.112.000.000
Rincian Output		:	01	ABA.001 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur	2.00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
			02	ABA.002 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Logistik	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
			03	ABA.003 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Transit Oriented Development	2.00	Rekomendasi Kebijakan	512.000.000
Kegiatan		:	4541	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi			3.097.500.000
		:	1. 01	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Pariwisata & Telekomunikasi (Triliun Rupiah)			
			2. 01	Persentase Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran			
			3. 01	Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dalam penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas			
			4. 02	Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi			
			5. 02	Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

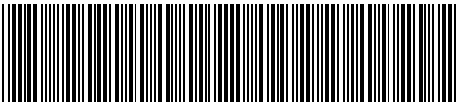


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi						
6. 03						

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

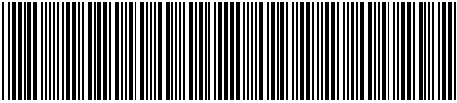


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				Rekomendasi Kebijakan, Kajian				
Farmasi dan Kesehatan				2.00	Rekomendasi Kebijakan			
Klasifikasi Rincian Output	21	:	4542.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.500.000.000	
Rincian Output		:	01	PBA.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
Kegiatan		:	4543	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis			2.662.500.000	
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1.	01	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, dan KIPK			
			2.	01	Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis (Triliun Rupiah)			
			3.	02	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion			
			4.	02	Persentase capaian penyaluran KUR di sektor produksi			
			5.	03	Persentase Debitur KUR Baru			
			6.	04	Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas			
			7.	05	Jumlah Realisasi Penyaluran KUR (Triliun Rupiah)			
			8.	06	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis			
Klasifikasi Rincian Output	22	:	4543.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	7,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.662.500.000	
Rincian Output		:	01	ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	887.500.000
			02	ABA.002	Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bullion	1.00	Rekomendasi Kebijakan	443.750.000
			03	ABA.003	Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bisnis	2.00	Rekomendasi Kebijakan	443.750.000
			04	ABA.004	Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	2.00	Rekomendasi Kebijakan	887.500.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA



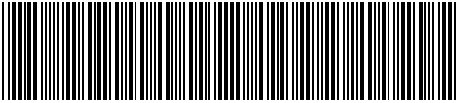
DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Halaman : I A. 10

Kegiatan	:	4544	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					2.500.000.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral						
		2. 01	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian pembentukan IBMA dalam rangka mendukung Ekosistem Bullion						
		3. 02	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati						
		4. 02	Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral						
		5. 03	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1						
		6. 04	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral						
Klasifikasi Rincian Output	23	:	4544.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan			9,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.500.000.000
Rincian Output	:	01	ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi			2.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
		02	ABA.002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Sumber Daya Mineral			1.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
		03	ABA.003	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Smelter Grade Alumina			2.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
		04	ABA.004	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kilang Bioethanol			2.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
		05	ABA.005	Rekomendasi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran			2.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
Kegiatan	:	4545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan					3.500.000.000	
	:	1. 01	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja						
		2. 01	Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi						
		3. 02	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan						
		4. 02	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan						
		5. 03	Perluasan Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional						
Klasifikasi Rincian Output	24	:	4545.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM			4,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.500.000.000
Rincian Output	:	01	PBK.001	Rekomendasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (PN)			1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
		02	PBK.002	Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan (PN)			3.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

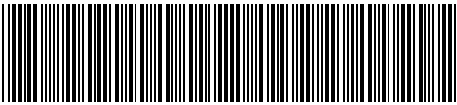


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM					Rekomendasi Kebijakan, Kajian		
Kegiatan	:	4546	Koordinasi Kebijakan Percepatan Investasi Dan Hilirisasi			3.000.000.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi				
		2. 01	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi				
Klasifikasi Rincian Output	25	:	4546.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	6,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.000.000.000
Rincian Output	:	01	ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Usaha yang Berdaya Saing	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
		02	ABA.002	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Hilirisasi selain Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
		03	ABA.003	Rekomendasi Kebijakan Pengintegrasian Sistem Perizian dan Penyelesaian Masalah yang Terkait Perizinan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Kegiatan	:	4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja			5.000.000.000	
	:	1. 03	Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja				
Klasifikasi Rincian Output	26	:	4550.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.000.000.000
Rincian Output	:	01	PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000.000
Kegiatan	:	5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi			37.155.708.000	
	:	1. 01	Penyelesain Efektivitas SKP Pengeluaran Perkapita laki-laki dan Perempuan				
		2. 02	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti				
Klasifikasi Rincian Output	27	:	5032.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	37.155.708.000
Rincian Output	:	01	ABA.001	Rekomendasi Implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	2.00	Rekomendasi Kebijakan	17.005.708.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

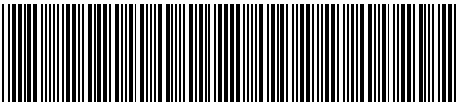


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				Rekomendasi Kebijakan, Kajian		
	02	ABA.002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syariah	2.00	Rekomendasi Kebijakan	10.650.000.000
	03	ABA.004	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	9.500.000.000
Kegiatan	: 5266	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis				12.500.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi				
	: 2. 01	Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing				
	: 3. 02	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional				
	: 4. 02	Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional				
Klasifikasi Rincian Output	28	: 5266.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	6,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.000.000.000
Rincian Output	: 01	ABF.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (Kawasan Industri, KPBPB, KSPN)	3.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	: 02	ABF.002	Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai Perpres 79/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021	3.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	29	: 5266.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	10.500.000.000
Rincian Output	: 01	PBF.001	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur (PN) Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	10.500.000.000
Kegiatan	: 7701	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata				3.500.000.000
	: 1. 01	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Juta)				
	: 2. 01	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				
	: 3. 02	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Juta)				
	: 4. 02	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

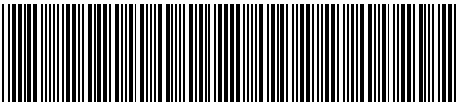


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Klasifikasi Rincian Output	30	:	7701.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	4,00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000
Rincian Output		:	01	ABA.001 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Pariwisata	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
		:	02	ABA.002 Rekomendasi Kebijakan dan Tata Kelola Dana Pariwisata Berkualitas	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	31	:	7701.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	3,00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
Rincian Output		:	01	PBA.003 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan (PN)	3.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
Kegiatan		:	7702	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka			3.500.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB			
		:	2. 01	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA			
		:	3. 02	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka			
Klasifikasi Rincian Output	32	:	7702.ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Rincian Output		:	01	ABK.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	33	:	7702.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	2,00	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000.000
Rincian Output		:	01	PBK.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
		:	02	PBK.002 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Industri Besi dan Baja (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Kegiatan		:	7703	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			4.000.000.000
		:	1. 01	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

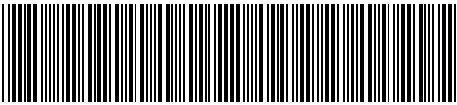


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

				Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata				
		2.	02	Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata				
		3.	03	Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata				
		4.	04	Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata				
		5.	05	Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy				
		6.	06	Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata				
		7.	07	Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata				
Klasifikasi Rincian Output	34	:	7703.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		4.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.001	Layanan Koordinasi Program, Tata Kelola dan Dukungan Administrasi di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	1.00	Layanan	2.000.000.000
			02	EBA.002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	1.00	Layanan	2.000.000.000
Kegiatan		:	7704	Peningkatan Layanan Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital				4.000.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1.	01	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
			2.	02	Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
			3.	03	Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
			4.	04	Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
			5.	05	Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy			
			6.	06	Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
			7.	07	Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
Klasifikasi Rincian Output	35	:	7704.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		4.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.001	Layanan Koordinasi Program, Tata Kelola dan Dukungan Administrasi di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan	1.00	Layanan	1.244.635.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

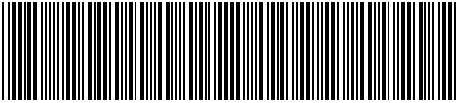


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Layanan Dukungan Manajemen Internal			Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		
		dan Ekonomi Digital	1.00	Layanan	
02	EBA.002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	1.00	Layanan	2.755.365.000
Kegiatan	: 7706	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi			2.500.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi			
	2. 01	Persentase Pencapaian Target Lifting Minyak Bumi			
	3. 02	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi			
	4. 02	Persentase Pencapaian Target Lifting Gas Bumi			
	5. 03	Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi			
Klasifikasi Rincian Output	36 : 7706.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	8,00	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000.000
Rincian Output	: 01	ABA.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi	2.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
	02	ABA.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	03	ABA.003 Rekomendasi Kebijakan dalam Koordinasi Pembangunan Fasilitas Pendukung Minyak dan Gas Bumi	2.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
	04	ABA.004 Rekomendasi Kebijakan terkait Regulasi Perpajakan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	2.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
Kegiatan	: 7707	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara			3.000.000.000
	: 1. 01	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya			
	2. 01	Persentase Pencapaian Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri			
	3. 01	Persentase Pencapaian Target Pengembangan Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara			
	4. 01	Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

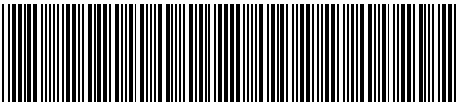


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara						
	5.	02	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri			
	6.	02	Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)			
Klasifikasi Rincian Output	37	:	7707.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5,00	Rekomendasi Kebijakan 3.000.000.000
Rincian Output		:	01	ABA.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Mineral	2.00	Rekomendasi Kebijakan 1.250.000.000
			02	ABA.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara	2.00	Rekomendasi Kebijakan 1.250.000.000
			03	ABA.003 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara	1.00	Rekomendasi Kebijakan 500.000.000
Kegiatan		:	7708	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		2.500.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1.	01 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik		
			2.	01 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan		
			3.	02 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik		
			4.	02 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita		
			5.	03 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional		
			6.	04 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan		
Klasifikasi Rincian Output	38	:	7708.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5,00	Rekomendasi Kebijakan 2.500.000.000
Rincian Output		:	01	ABA.001 Rekomendasi Kebijakan Dekarbonisasi dan Penguatan Sistem Ketenagalistrikan	2.00	Rekomendasi Kebijakan 1.000.000.000
			02	ABA.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Geologi	2.00	Rekomendasi Kebijakan 1.000.000.000
			03	ABA.003 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup mendukung Ketahanan Energi Nasional	1.00	Rekomendasi Kebijakan 500.000.000
Kegiatan		:	7709	Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi		3.000.000.000
		:	1.	01 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

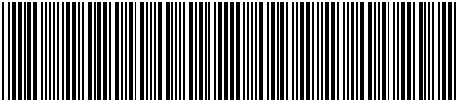


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi						
	2. 01	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biofuel				
	3. 01	Presentasi Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan /Just Energy Transition Partnership (JETP)				
	4. 02	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)				
	5. 03	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS				
Klasifikasi Rincian Output	39	:	7709.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		3.000.000.000
				6,00	Rekomendasi Kebijakan	
Rincian Output		:	01 ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Biofuel		1.000.000.000
			02 ABA.002	Rekomendasi Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan		1.000.000.000
			03 ABA.003	Rekomendasi Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon		1.000.000.000
				2,00	Rekomendasi Kebijakan	
Kegiatan		:	7710	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan		2.500.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara		
			2. 01	Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas		
			3. 02	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis		
			4. 02	Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar		
Klasifikasi Rincian Output	40	:	7710.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		1.000.000.000
				2,00	Rekomendasi Kebijakan	
Rincian Output		:	01 ABA.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi		500.000.000
			02 ABA.002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Alumina		500.000.000
				1,00	Rekomendasi Kebijakan	
Klasifikasi Rincian Output	41	:	7710.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		1.500.000.000
				4,00	Rekomendasi Kebijakan	
Rincian Output		:	01 PBA.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Nikel (PN)		1.500.000.000
				4,00	Rekomendasi Kebijakan	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

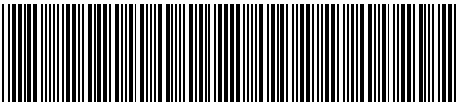


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Kegiatan	:	7711	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral			4.500.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Tingkat implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
		2. 02	Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
		3. 03	Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
		4. 04	Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
		5. 05	Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy			
		6. 06	Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
		7. 07	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
Klasifikasi Rincian Output	42	:	7711.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.500.000.000
Rincian Output	:	01	EBA.001 Layanan Koordinasi Program, Tata Kelola dan Dukungan Administrasi di Lingkungan DeputyBidang Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.00	Layanan	2.000.000.000
		02	EBA.002 Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Minerali	1.00	Layanan	2.500.000.000
Kegiatan	:	7712	Peningkatan Layanan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			5.000.000.000
	:	1. 01	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
		2. 02	Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
		3. 03	Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
		4. 04	Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
		5. 05	Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy			
		6. 06	Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
		7. 07	Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

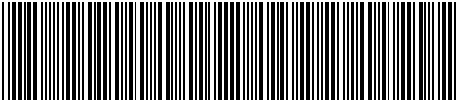


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Klasifikasi Rincian Output	43	:	7712.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.001	Layanan Koordinasi Program, Tata Kelola dan Dukungan Administrasi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Layanan	2.000.000.000
		:	02	EBA.002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Layanan	3.000.000.000
Program		:	035.01.WA	Program Dukungan Manajemen			227.965.170.000
Kegiatan		:	2486	Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama			19.153.092.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama			
		:	2. 01	Nilai AKIP			
		:	3. 01	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama			
		:	4. 01	Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja			
		:	5. 02	Indeks SPBE			
		:	6. 02	Nilai AKIP Sekretariat			
		:	7. 02	Persentase Penyelesain Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran			
		:	8. 03	Indeks Perencanaan			
		:	9. 03	Persentase Penyelesaian Penyelerasan Kerja Sama dan Kinerja			
		:	10. 04	Indeks Kualitas Kebijakan			
		:	11. 04	Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan			
		:	12. 05	Capaian Prioritas Nasional			
		:	13. 05	Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi			
		:	14. 06	Capaian Indikator Kinerja Utama			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Halaman : I A. 20

Klasifikasi Rincian Output	1	:	2486.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	4,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.500.000.000
Rincian Output		:	01 ABA.001	Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian	4.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2486.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	Unit	7.000.000.000
Rincian Output		:	01 CCL.001	Layanan Sarana Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2.00	Unit	7.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2486.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	6.153.092.000
Rincian Output		:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	6.153.092.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	2486.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	13,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.500.000.000
Rincian Output		:	01 EBD.001	Layanan Fasilitas Penguatan Kinerja	6.00	Dokumen	3.000.000.000
		:	02 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7.00	Dokumen	1.500.000.000
Kegiatan		:	2487	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi			4.000.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi			
		:	2. 01	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi			
		:	3. 01	Persentase Penyelesaian Dokumen Koordinasi Perumusan Produk Hukum			
		:	4. 01	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi			
		:	5. 02	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi			
		:	6. 02	Persentase Penyelesaian Dokumen Advokasi Hukum			
		:	7. 03	Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Organisasi			
		:	8. 03	Tingkat Capaian Sistem Kerja			

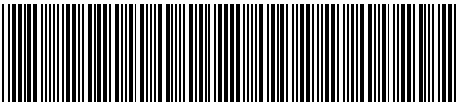
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi									
		9.	04	Indeks Reformasi Hukum					
		10.	04	Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Sistem Kerja					
		11.	05	Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi Tematik					
		12.	06	Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi General					
Klasifikasi Rincian Output	5	:	2487.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		3.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.001	Layanan Hukum Bidang Ekonomi Makro, Fiskal PNPB, Pengembangan Usaha BUMN, ESDM, Hilirisasi Pertanian, Perniagaan, Industri, Investasi, Sekretariat Kementerian, dan Inspektorat	1.00	Layanan		1.000.000.000
			02	EBA.002	Layanan Hukum Bidang Ekonomi Digital, Fiskal Pajak, Ketenagakerjaan, Kerja Sama Ekonomi, Pariwisata, Pengembangan Kawasan Ekonomi, dan Proyek Strategis	1.00	Layanan		1.000.000.000
			03	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan		1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	2487.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		1.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.001	Layanan Reformasi Birokrasi	1.00	Layanan		1.000.000.000
Kegiatan		:	2488	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Umum					185.437.328.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1.	01	Indeks Penyelenggaraan Arsip				
			2.	01	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia				
			3.	01	Persentase Penyelesaian Layanan SDM yang Tepat Waktu				
			4.	02	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Keuangan				
			5.	02	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)				
			6.	03	Indeks Pengelolaan Aset				
			7.	03	Indeks kepuasan layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

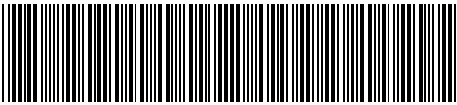


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Umum								
		8.	03	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Arsip secara Elektronik				
		9.	04	Indeks NSPK Manajemen ASN				
		10.	04	Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Aset kepada Pengelola Barang yang Tepat Waktu				
		11.	05	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa				
		12.	05	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan				
		13.	06	Persentase Pemenuhan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa				
Klasifikasi Rincian Output	7	:	2488.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		5,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	171.136.828.000
Rincian Output		:	01	EBA.001	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1.00	Layanan	1.000.000.000
		:	02	EBA.959	Layanan Protokoler	1.00	Layanan	1.800.000.000
		:	03	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	1.000.000.000
		:	04	EBA.994	Layanan Perkantoran	2.00	Layanan	167.336.828.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	2488.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		37,00	Unit, m2, Paket	9.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	37.00	Paket	9.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	2488.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		750,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	4.792.500.000
Rincian Output		:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	750.00	Orang	4.792.500.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	2488.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	508.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	508.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA

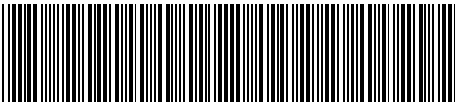


DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Kegiatan	:	2489	Pengawasan Inspektorat				1.224.750.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat				
		2. 01	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan				
		3. 01	Terwujudnya Tata Kelola APIP Yang Baik				
		4. 02	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi				
		5. 02	Persentase Rekomendasi Audit Internal Yang Ditindaklanjuti				
Klasifikasi Rincian Output	11	:	2489.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	Unit	26.625.000
Rincian Output	:	01	CCL.001	Layanan Sarana Sistem Informasi Inspektorat	1.00	Unit	26.625.000
Klasifikasi Rincian Output	12	:	2489.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.198.125.000
Rincian Output	:	01	EBD.965	Layanan Audit Internal	10.00	Dokumen	1.198.125.000
Kegiatan	:	2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian				7.500.000.000
	:	1. 01	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian				
		2. 02	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa yang diterima Menko Perekonomian				
		3. 03	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Transformasi Digital yang diterima Menko Perekonomian				
		4. 04	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Pembangunan Daerah yang diterima Menko Perekonomian				
		5. 05	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian				
Klasifikasi Rincian Output	13	:	2490.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	10,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.500.000.000
Rincian Output	:	01	ABA.001	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
		02	ABA.002	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				Rekomendasi Kebijakan, Kajian		
	03	ABA.003	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Transformasi Digital	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
	04	ABA.004	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pembangunan Daerah	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
	05	ABA.005	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
Kegiatan	:	4538	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan			10.650.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan			
		2. 01	Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kemenko Bidang Perekonomian Di Media Massa			
		3. 01	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan			
		4. 01	Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang Terselesaikan Tepat Waktu			
		5. 02	Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan			
		6. 02	Persentase Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi Tepat Waktu			
		7. 03	Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu			
Klasifikasi Rincian Output	14	:	4538.BMB Komunikasi Publik	2,00	layan	9.585.000.000
Rincian Output	:	01	BMB.003 Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi	1.00	layan	8.000.000.000
		02	BMB.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	layan	1.585.000.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	4538.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.065.000.000
Rincian Output	:	01	EBA.001 Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1.00	Layanan	532.500.000
		02	EBA.002 Layanan Penyiapan Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1.00	Layanan	532.500.000

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menko Bidang Perekonomian
Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian

ttd.
Susiwijono
NIP. 196907071989121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
I B. SUMBER DANA



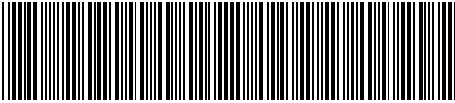
Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

				Pagu		Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	424.437.378.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	424.437.378.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	109.915.785	305.801.593	8.720.000	-	-	424.437.378	01 . 51	
035.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-	196.472.208	-	-	-	196.472.208		
2491	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000		
2491.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	500.000	-	-	-	500.000		
01	RM	-	500.000	-	-	-	500.000		
2491.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000		
01	RM	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000		
2492	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000		
2492.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000		
01	RM	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000		
2493	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	-	42.247.000	-	-	-	42.247.000		

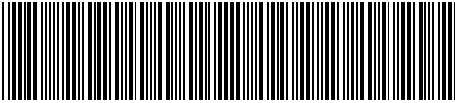
DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga	: (035)	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi	: (01)	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker	: (427752)	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan	: (KP)	

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



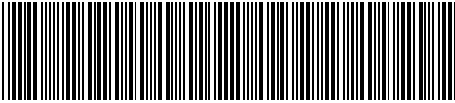
DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2503.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	01 . 51	
01	RM	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	019	
2510	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000		
2510.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	01 . 51	
01	RM	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	019	
2513	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	-	7.135.000	-	-	-	7.135.000		
2513.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 51	
01	RM	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	019	
2513.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.135.000	-	-	-	5.135.000	01 . 51	
01	RM	-	5.135.000	-	-	-	5.135.000	019	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2514	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	-	6.800.000	-	-	-	6.800.000	01 . 51	
2514.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.800.000	-	-	-	6.800.000		
01 RM		-	6.800.000	-	-	-	6.800.000	019	
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	01 . 51	
2519.ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000		
01 RM		-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	019	
2519.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 51	
01 RM		-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	019	
2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	01 . 51	
2521.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000		

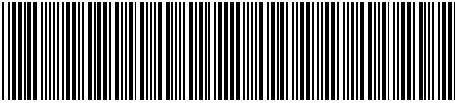
DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga	: (035)	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi	: (01)	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker	: (427752)	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan	: (KP)	

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



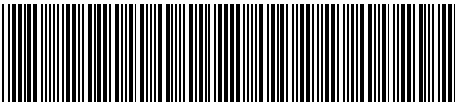
DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4541.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.597.500	-	-	-	1.597.500	01 . 51	
01	RM	-	1.597.500	-	-	-	1.597.500	019	
4541.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 51	
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	019	
4542	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	-	3.097.500	-	-	-	3.097.500		
4542.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.597.500	-	-	-	1.597.500	01 . 51	
01	RM	-	1.597.500	-	-	-	1.597.500	019	
4542.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 51	
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	019	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



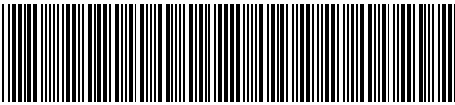
DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4543	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	-	2.662.500	-	-	-	2.662.500	01 . 51	
4543.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.662.500	-	-	-	2.662.500		
01 RM		-	2.662.500	-	-	-	2.662.500	019	
4544	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	01 . 51	
4544.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000		
01 RM		-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	019	
4545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	01 . 51	
4545.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000		
01 RM		-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	019	
4546	Koordinasi Kebijakan Percepatan Investasi Dan Hilirisasi	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4546.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	01 . 51	
01 RM		-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	019	
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000		
4550.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	01 . 51	
01 RM		-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	019	
5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	-	37.155.708	-	-	-	37.155.708		
5032.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	37.155.708	-	-	-	37.155.708	01 . 51	
01 RM		-	37.155.708	-	-	-	37.155.708	019	
5266	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	-	12.500.000	-	-	-	12.500.000		
5266.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 51	

DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga	: (035)	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi	: (01)	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker	: (427752)	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan	: (KP)	

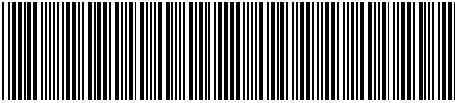
[illegible]

DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga	: (035)	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi	: (01)	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker	: (427752)	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan	: (KP)	

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 11
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	019	
7706	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000		
7706.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	01 . 51	
01 RM		-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	019	
7707	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000		
7707.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	01 . 51	
01 RM		-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	019	
7708	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000		
7708.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	01 . 51	
01 RM		-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	019	
7709	Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000		

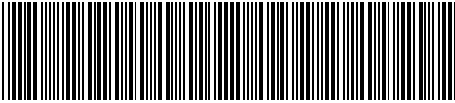
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7709.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	019	
7710	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000		
7710.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	019	
7710.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	019	
7711	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000		
7711.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	01 . 51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	019	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



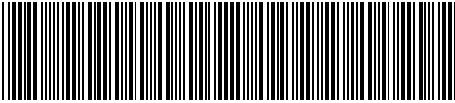
DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 13
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7712	Peningkatan Layanan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	01 . 51	
7712.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000		
01	RM	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	019	
035.01.WA	Program Dukungan Manajemen	109.915.785	109.329.385	8.720.000	-	-	227.965.170		
2486	Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	-	18.353.092	800.000	-	-	19.153.092		
2486.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 51	
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	019	
2486.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.200.000	800.000	-	-	7.000.000	01 . 51	
01	RM	-	6.200.000	800.000	-	-	7.000.000	019	
2486.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.153.092	-	-	-	6.153.092	01 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



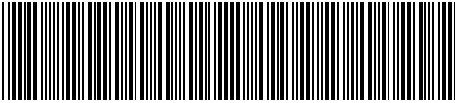
DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 14
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
01 RM		-	6.153.092	-	-	-	6.153.092	019	
2486.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	01 . 51	
01 RM		-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	019	
2487	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000		
2487.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	01 . 51	
01 RM		-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	019	
2487.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 51	
01 RM		-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	019	
2488	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Umum	109.915.785	67.601.543	7.920.000	-	-	185.437.328		
2488.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	109.915.785	61.221.043	-	-	-	171.136.828	01 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



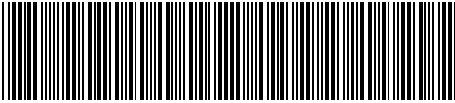
DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 15
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
01 RM		109.915.785	61.221.043	-	-	-	171.136.828	019	
2488.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.080.000	7.920.000	-	-	9.000.000	01 . 51	
01 RM		-	1.080.000	7.920.000	-	-	9.000.000	019	
2488.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.792.500	-	-	-	4.792.500	01 . 51	
01 RM		-	4.792.500	-	-	-	4.792.500	019	
2488.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	508.000	-	-	-	508.000	01 . 51	
01 RM		-	508.000	-	-	-	508.000	019	
2489	Pengawasan Inspektorat	-	1.224.750	-	-	-	1.224.750		
2489.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	26.625	-	-	-	26.625	01 . 51	
01 RM		-	26.625	-	-	-	26.625	019	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Kewenangan : (KP)

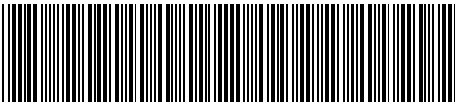
Halaman : II. 16
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2489.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.198.125	-	-	-	1.198.125	01 . 51	
01 RM		-	1.198.125	-	-	-	1.198.125	019	
2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000		
2490.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	01 . 51	
01 RM		-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	019	
4538	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan	-	10.650.000	-	-	-	10.650.000		
4538.BMB	Komunikasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	9.585.000	-	-	-	9.585.000	01 . 51	
01 RM		-	9.585.000	-	-	-	9.585.000	019	
4538.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.065.000	-	-	-	1.065.000	01 . 51	
01 RM		-	1.065.000	-	-	-	1.065.000	019	
JUMLAH		109.915.785	305.801.593	8.720.000	-	-	424.437.378		

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menko Bidang Perekonomian
Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian

ttd.
Susiwijono
NIP. 196907071989121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



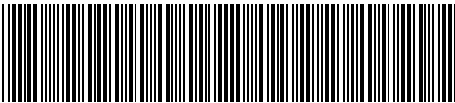
DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	14.097.643	27.107.188	32.876.964	30.394.599	39.780.394	35.444.603	35.518.750	35.881.209	34.739.312	38.502.105	46.948.290	53.146.320	424.437.378
		BELANJA PEGAWAI	0	10.310.600	10.310.600	10.310.600	10.310.600	10.310.600	10.310.600	10.310.600	10.310.600	10.310.600	10.310.600	6.809.785	109.915.785
		BELANJA BARANG	14.097.643	16.796.588	22.566.364	19.101.486	23.832.602	24.811.338	24.885.485	25.247.944	24.106.047	27.728.688	36.315.025	46.312.383	305.801.593
		BELANJA MODAL	0	0	0	982.513	5.637.192	322.665	322.665	322.665	322.665	462.817	322.665	24.152	8.720.000
		035.01.CL.2491 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital	318.950	318.950	318.950	318.950	318.950	318.950	318.950	318.950	318.950	318.950	318.950	373.115	937.385
		035.01.CL.2492 52 BELANJA BARANG DAN JASA Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal	318.950	318.950	318.950	318.950	318.950	318.950	318.950	318.950	318.950	318.950	318.950	373.115	937.385
		035.01.CL.2493 52 BELANJA BARANG DAN JASA Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	2.000.000
		035.01.CL.2493 52 BELANJA BARANG DAN JASA Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	166.663	2.000.000
		035.01.CL.2499 52 BELANJA BARANG DAN JASA Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga	1.697.941	2.974.556	1.670.779	3.374.738	1.670.779	2.974.556	3.001.718	2.682.488	3.001.718	3.015.318	5.351.450	10.830.962	42.247.000
		035.01.CL.2499 52 BELANJA BARANG DAN JASA Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga	1.697.941	2.974.556	1.670.779	3.374.738	1.670.779	2.974.556	3.001.718	2.682.488	3.001.718	3.015.318	5.351.450	10.830.962	42.247.000
		035.01.CL.2500 52 BELANJA BARANG DAN JASA Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	195.193	199.042	199.309	199.042	199.309	199.042	199.042	201.875	197.759	184.268	197.680	328.439	2.500.000
		035.01.CL.2500 52 BELANJA BARANG DAN JASA Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	195.193	199.042	199.309	199.042	199.309	199.042	199.042	201.875	197.759	184.268	197.680	328.439	2.500.000
		035.01.CL.2503 52 BELANJA BARANG DAN JASA Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan	207.380	207.380	207.380	207.380	207.380	207.380	207.380	207.380	207.380	207.380	232.340	193.860	2.500.000
		035.01.CL.2503 52 BELANJA BARANG DAN JASA Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan	207.380	207.380	207.380	207.380	207.380	207.380	207.380	207.380	207.380	207.380	232.340	193.860	2.500.000
		035.01.CL.2503 Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan	241.207	241.207	241.207	241.207	241.207	163.875	241.207	163.875	163.875	163.875	135.945	1.761.313	4.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



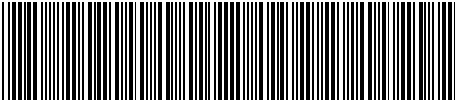
DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
035.01.CL.2510		Pengelolaan BUMN													
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	241.207	241.207	241.207	241.207	241.207	163.875	241.207	163.875	163.875	163.875	135.945	1.761.313	4.000.000
		Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral	333.328	333.328	333.328	333.328	333.328	333.328	333.328	333.328	333.328	333.328	333.328	333.392	4.000.000
035.01.CL.2513		52 BELANJA BARANG DAN JASA	333.328	333.328	333.328	333.328	333.328	333.328	333.328	333.328	333.328	333.328	333.328	333.392	4.000.000
		Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	594.576	594.576	594.576	594.576	594.576	594.576	594.576	594.576	594.576	594.576	594.576	594.664	7.135.000
035.01.CL.2514		52 BELANJA BARANG DAN JASA	594.576	594.576	594.576	594.576	594.576	594.576	594.576	594.576	594.576	594.576	594.576	594.664	7.135.000
		Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	566.656	566.656	566.656	566.656	566.656	566.656	566.656	566.656	566.656	566.656	566.656	566.784	6.800.000
035.01.CL.2519		52 BELANJA BARANG DAN JASA	566.656	566.656	566.656	566.656	566.656	566.656	566.656	566.656	566.656	566.656	566.656	566.784	6.800.000
		Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	291.662	291.662	291.662	291.662	291.662	291.662	291.662	291.662	291.662	291.662	291.662	291.718	3.500.000
035.01.CL.2521		52 BELANJA BARANG DAN JASA	291.662	291.662	291.662	291.662	291.662	291.662	291.662	291.662	291.662	291.662	291.662	291.718	3.500.000
		Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	208.328	208.328	208.328	208.328	208.328	208.328	208.328	208.328	208.328	208.328	208.328	208.392	2.500.000
035.01.CL.4539		52 BELANJA BARANG DAN JASA	208.328	208.328	208.328	208.328	208.328	208.328	208.328	208.328	208.328	208.328	208.328	208.392	2.500.000
		Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	179.664	179.664	179.664	179.664	179.664	179.664	179.664	124.897	179.664	132.834	179.664	290.293	2.165.000
035.01.CL.4540		52 BELANJA BARANG DAN JASA	179.664	179.664	179.664	179.664	179.664	179.664	179.664	124.897	179.664	132.834	179.664	290.293	2.165.000
		Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	125.583	125.583	125.583	111.819	104.891	104.891	125.583	104.891	104.891	104.891	104.891	868.501	2.112.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	125.583	125.583	125.583	111.819	104.891	104.891	125.583	104.891	104.891	104.891	104.891	868.501	2.112.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Halaman : III. 3
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
035.01.CL.4541		Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	126.634	126.634	126.634	126.634	126.634	126.634	126.634	126.634	126.634	126.634	126.634	1.704.526	3.097.500
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	126.634	126.634	126.634	126.634	126.634	126.634	126.634	126.634	126.634	126.634	126.634	1.704.526	3.097.500
035.01.CL.4542		Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	258.112	258.112	258.112	258.112	258.112	258.112	258.112	258.112	258.112	244.391	244.391	285.710	3.097.500
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	258.112	258.112	258.112	258.112	258.112	258.112	258.112	258.112	258.112	244.391	244.391	285.710	3.097.500
035.01.CL.4543		Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	263.822	263.822	263.822	263.822	209.978	209.978	263.822	141.851	65.571	65.571	65.029	585.412	2.662.500
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	263.822	263.822	263.822	263.822	209.978	209.978	263.822	141.851	65.571	65.571	65.029	585.412	2.662.500
035.01.CL.4544		Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	193.386	193.386	152.799	132.497	132.497	132.497	193.386	132.497	132.497	97.739	97.739	909.080	2.500.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	193.386	193.386	152.799	132.497	132.497	132.497	193.386	132.497	132.497	97.739	97.739	909.080	2.500.000
035.01.CL.4545		Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	291.660	291.660	291.660	291.660	291.660	291.660	291.660	291.660	291.660	291.660	291.660	291.740	3.500.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	291.660	291.660	291.660	291.660	291.660	291.660	291.660	291.660	291.660	291.660	291.660	291.740	3.500.000
035.01.CL.4546		Koordinasi Kebijakan Percepatan Investasi Dan Hilirisasi	249.989	249.989	249.989	249.989	249.989	249.989	249.989	249.989	249.989	249.989	249.989	250.121	3.000.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	249.989	249.989	249.989	249.989	249.989	249.989	249.989	249.989	249.989	249.989	249.989	250.121	3.000.000
035.01.CL.4550		Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	175.099	262.505	443.820	456.140	443.820	456.140	456.140	456.140	456.140	456.140	456.140	481.779	5.000.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	175.099	262.505	443.820	456.140	443.820	456.140	456.140	456.140	456.140	456.140	456.140	481.779	5.000.000
035.01.CL.5032		Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	2.466.726	2.670.976	2.900.266	3.104.516	2.466.726	3.486.636	3.282.386	3.254.408	2.900.266	3.259.226	2.900.266	4.463.310	37.155.708

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Halaman : III. 4
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DS:3745-5647-3911-1615

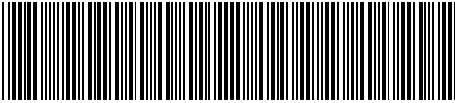
DS:3745-5647-3911-1615

Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Halaman : III. 5
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427752) MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

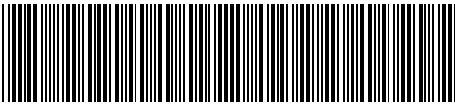
Halaman : III. 6
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
035.01.WA.2489		51 BELANJA PEGAWAI	0	10.310.600	10.310.600	10.310.600	10.310.600	10.310.600	10.310.600	10.310.600	10.310.600	10.310.600	10.310.600	6.809.785	109.915.785
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	175.443	390.998	7.141.320	535.717	7.939.634	7.190.261	7.276.262	7.203.453	7.276.262	7.763.921	8.208.179	6.500.094	67.601.543
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	322.665	5.637.192	322.665	322.665	322.665	322.665	322.665	322.665	24.152	7.920.000
		Pengawasan Inspektorat	4.043	63.167	63.167	91.691	63.167	63.167	63.167	63.167	63.167	94.598	262.237	330.010	1.224.750
035.01.WA.2490		52 BELANJA BARANG DAN JASA	4.043	63.167	63.167	91.691	63.167	63.167	63.167	63.167	63.167	94.598	262.237	330.010	1.224.750
		Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian	265.897	556.778	377.952	548.960	459.260	522.251	521.074	609.499	453.442	609.499	1.033.654	1.541.733	7.500.000
035.01.WA.4538		52 BELANJA BARANG DAN JASA	265.897	556.778	377.952	548.960	459.260	522.251	521.074	609.499	453.442	609.499	1.033.654	1.541.733	7.500.000
		Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan	23.541	475.687	517.560	694.580	1.375.711	744.838	693.795	1.694.580	556.082	1.821.793	783.617	1.268.216	10.650.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	23.541	475.687	517.560	694.580	1.375.711	744.838	693.795	1.694.580	556.082	1.821.793	783.617	1.268.216	10.650.000

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menko Bidang Perekonomian
Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian

ttd.
Susiwijono
NIP. 196907071989121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
IV A. B L O K I R



DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : [035] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : [01] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [427752] MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

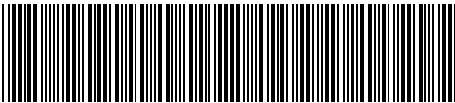
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menko Bidang Perekonomian
Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian

ttd.
Susiwijono
NIP. 196907071989121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 035.01.1.427752/2026
IV B. C A T A T A N



DS:3745-5647-3911-1615

Kementerian Negara/Lembaga : [035] KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Organisasi : [01] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [427752] MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menko Bidang Perekonomian
Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian

ttd.
Susiwijono
NIP. 196907071989121001